

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambar Lokus/Umum Penelitian



**Gambar 4. 1** Yayasan Bina Anak Pertiwi

#### 4.1.1. Sejarah Singkat

Dua Puluh satu tahun yang lalu, tepatnya awal mula terjadinya krisis politik serta kebangkrutan ekonomi, ada sekelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam sebuah kelompok kajian sosial akademis yang cukup intens bernama Forum Studi Dialektika (FOSTUDIA), merasa gelisah dan sekaligus prihatin dengan nasib bangsanya sendiri, terutama fenomena meningkatnya jumlah anak-anak putus sekolah dan anak jalanan/terlantar. Mereka sudah bosan dengan berbagai aksi demonstrasi yang selalu mengusung jargon “reformasi” yang dinilainya kurang lagi menyuarakan kepentingan lapisan masyarakat bawah. Forum tersebut beranggotakan mahasiswa-mahasiswa lintas perguruan tinggi yang terdiri dari mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK) Darul Qalam, dan Bina Sarana Informatika (BSI). Forum ini sepakat untuk menampilkan

sebuah “reformasi gaya baru” yang bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara langsung. Karena itu kemudian dirumuskan sebuah agenda aksi sosial dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya dapat dilakukan. Maka, kelompok masyarakat anak jalanan menjadi prioritas utama, mengingat kelompok masyarakat ini tergolong rawan sosial dan masalahnya kompleks sekali.

Aksi sosial yang dilakukan adalah berupa kepedulian terhadap nasib pendidikan, kesehatan, kesejahteraan anak jalanan/terlantar yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pendidikan luar sekolah paket A setara SD, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan pembelajaran tersebut awalnya dilaksanakan di Masjid Pasar Kebayoran Lama, tepatnya bulan Juni 1997, dengan warga belajar umumnya anak jalanan dan anak pemulung berjumlah 73 anak. Saat itu proses kegiatan pembelajaran bernaung dibawah sebuah Rumah Singgah sosial. Namun, kegiatan kurang berjalan mulus karena kurang sepahaman antara kelompok mahasiswa yang mengusung idealisme dengan pihak Rumah Singgah yang berujung pada hengkangnya kelompok mahasiswa yang mengusung idealisme dengan pihak Rumah Singgah yang berujung pada hengkangnya kelompok mahasiswa dari kegiatan tersebut. Akhirnya kegiatan belajar mengajar menjadi bubar. Sekelompok mahasiswa tersebut tidak patah arang dan ingin tetap berbagi dengan sesama.

Tepatnya awal bulan Juni 1998, pasca reformasi bergulir, dengan tekad yang bulat dan dibarengi oleh kejenuhan berdemonstrasi mereka kembali turun gelanggang melakukan aksi sosial di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan (P3A). Nama ini lebih spesifik dan mencerminkan sebuah wadah pembinaan terhadap anak jalanan. Awalnya kegiatan ini hanyalah kegiatan kemahasiswaan biasa. Namun dalam perjalanannya, kegiatan tersebut mendapatkan

dukungan luas dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Dari pihak pemerintah, dukungan datang secara langsung dari Dirjen Dikluspora Depdiknas RI, waktu itu, Bapak Prof. Dr. Sudijarto. Bahkan Dharma Wanita Dikluspora dan Depdiknas RI adalah salah satu donatur kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan pembelajaran tersebut diresmikan langsung oleh Ibu Soerono (Kasi Dikmenti DKI Jakarta) pada bulan Juni 1998 bertempat di Masjid Al-Awwabin Polsek Pasar Minggu. Dari kelompok masyarakat, kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok pengajian serta perorangan, bahkan ada dari kalangan pengusaha. Seperti Pengajian Jenggala Cipete Selatan, Rumah Singgah RAHMA (yang menyediakan nasi murah/cepek), Pengajian Keluarga Sakinah, dll.

Mengingat kegiatan sosial tersebut haruslah berkesinambungan dan mesti ada pertanggungjawaban secara yuridis, muncul desakan dari kalangan masyarakat agar wadahnya berbadan hukum. Karena itu kelompok mahasiswa tersebut mulai berpikir keras serta melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh nasional untuk mendukung kelangsungan serta keberhasilan proses belajar mengajar tersebut. Maka, muncul beberapa nama tokoh nasional seperti Hj. Anniswati M. Kamaluddin (Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI), Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim (anggota DPR RI), Prof. DR. Ir. H. Fachrudin (Mantan Rektor Universitas Hasanuddin Ujung Pandang yang juga anggota DPR RI), H. Houtman Z. Arifin (seorang Bankir dan Mantan Vice President Citibank), Hj. Yufimar Ali, SH (keluarga pengusaha dan anggota Dewan Pakar ICMi ORWIL DKI Jakarta). Di samping mereka terlibat sebagai anggota badan pendiri, sekaligus juga sebagai dewan pembina lembaga, yang kemudian dibakukan dengan akte notaris No. 2, tanggal 3 November 1998 dengan nama Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, Pusat Pembinaan dan Rumah Belajar Anak Jalanan atau Terlantar.

Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, sebagai Pusat Pembinaan dan rumah belajar anak jalanan atau anak terlantar, dalam menjalankan aktivitasnya selalu bersama-sama masyarakat dimana kegiatan tersebut dilangsungkan. Adanya pengakuan masyarakat serta rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap lembaga merupakan modal utama keberhasilan kelangsungan program. Menciptakan rasa saling ketergantungan antara masyarakat dengan lembaga, demikian juga sebaliknya adalah merupakan suatu hal yang niscaya. Untuk itu, diperlukan sinergisitas antara kepentingan lembaga dengan kebutuhan masyarakat. Pihak lembaga harus mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan, potensi yang dimiliki serta menginventarisasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, apa yang diprogramkan oleh lembaga adalah merupakan cerminan dari suatu kebutuhan murni serta harapan segmen-segmen masyarakat tertentu yang akan diberdayakannya. Untuk itulah, Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, dengan motto, "bersama untuk bangsa", telah melaksanakan berbagai program riil di masyarakat, seperti, Bimbingan Agama dan Etika Bermasyarakat, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja, Pengembangan Seni Budaya (Minat dan Bakat), Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan, Pengembangan Usaha Mandiri serta Penempatan Kerja.

#### **4.1.2. Visi dan Misi**

##### **Visi:**

Meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin, terutama anak yatim, anak jalanan atau terlantar serta anak kurang mampu menjadi anak bangsa yang konstruktif dan bermartabat sejalan dengan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih berkualitas.

**Misi:**

1. Menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi.
2. Menciptakan peluang kerja baru dengan mengembangkan pelatihan kerja.
3. Menggali serta memberdayakan potensi yang dimilikinya agar menjadi manusia yang mandiri dan produktif.
4. Mengembangkan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk turut serta mengentaskan dan memberdayakan fakir miskin, terutama anak yatim, anak jalanan atau terlantar, dan anak kurang mampu.

**4.1.3. Tujuan Program**

1. Mengembangkan sikap mental positif
2. Membangun akhlak al-karimah
3. Menggali serta memberdayakan potensi yang dimiliki warga binaan.
4. Memberikan gambaran akan kepastian masa depan dengan berbekal berbagai keterampilan kerja dan pengembangan usaha mandiri, serta penempatan kerja.

**4.1.4. Pengembangan Program**

Selama tahun 1998 kegiatan pokok lembaga adalah pembelajaran paket A setara SD. Namun sejak tahun 1999, selain dikembangkan ke paket B setara SLTP, juga dibarengi dengan berbagai program keterampilan kerja, seperti perkebunan, perdagangan, serta keterampilan usaha lainnya. Program kegiatan lebih difokuskan pada pemberdayaan social ekonomi seiring dengan dikukuhkannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (RUMAH SINGGAH) Pesantren Kota, pada tanggal 12 April 2003 oleh Bapak Dr. H. Fasli Jalal (Dirjen Diklusepa Depdiknas RI, Sekarang Wakil Menteri Kemendiknas RI), berbarengan dengan peresmian gedung Asrama Pesantren Kota Bina Anak Pertiwi.

#### 4.1.5. Struktur Yayasan Bina Anak Pertiwi

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua                     | : Ali Santoso                                                                        |
| Sekretaris                | : Diana Lestari                                                                      |
| Bendahara                 | : Nadilah Zein                                                                       |
| Kabid. Pendidikan         | : 1. Rizky Rusdianti<br>2. Reni Fitriani                                             |
| Kabid. Media              | : 1. H. M. Husniadi<br>2. Basri                                                      |
| Kabid. Keterampilan       | : 1. Akhmad Kamaludin<br>2. M. Gabriel                                               |
| Kabid. Pengembangan Usaha | : 1. Arianto<br>2. Aisyah                                                            |
| Kabid. Keagamaan          | : Baihakki                                                                           |
| Kabid. Kesehatan          | : 1. Maman Suherman<br>2. Hendra Puta<br>3. Ade Suroto<br>4. Zulkarnaen              |
| Sosial                    | : 1. Deni Setiawan<br>2. Agus Malabar<br>3. M. Arviansyah<br>4. Zulfikar<br>5. Bahar |
| Staff Umum                | : Dzul Jalaali Walikrom                                                              |
| Koordinator Anak Binaan   | : Irfan Nurfajar                                                                     |
| Koordinator Warga Binaan  | : Ina Marlina                                                                        |

#### 4.1.6. Model dan Bentuk Layanan Pendidikan

##### a. Model-Model Layanan

Pendidikan layanan khusus anak jalanan dapat dilaksanakan dengan berbagai model, antara lain:

1. Pendidikan Persekolahan, merupakan layanan pendidikan bagi anak daerah terpencil dengan menerapkan kurikulum Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Model Guru Kunjung, merupakan layanan akses pendidikan bagi anak daerah terpencil dengan mendatangkan atau mengirimkan guru ke lingkungan komunitas peserta didik.
3. *Treatment centre*, yaitu layanan pendidikan yang lebih difokuskan pada perubahan sikap mental, perilaku, dan upaya pemulihan lainnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dunianya kembali, serta dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia.
4. *Boarding house*, Adalah tempat tinggal sementara untuk melakukan proses pembelajaran kepada anak jalanan. Boarding House bersifat sementara dan diharapkan dalam jangka waktu tertentu anak akan mengalami proses adaptasi dengan lingkungan sosial yang dibangun dengan memperkenalkan kembali atmosfer dalam keluarga, bahwa dalam hidup ini harus ada hirarki, aturan main, dan lainnya.
5. *Life Skill*, Pendidikan dan Pelatihan-Pelatihan Keterampilan bermata pencaharian, seperti; Komputer, Sandal Sepatu dan Hotel, Montir Motor, Menjahit, pertanian, dll.

#### **b. Bentuk Layanan Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus anak daerah terpencil merupakan pendidikan inklusif yang dilaksanakan, antara lain:

1. Pendidikan Persekolahan, merupakan layanan pendidikan bagi anak daerah terpencil, penyelenggaraannya berupa:
  - a) SD/MI Kecil
  - b) SMP/MTs Kecil Pendidikan Layanan Khusus
  - c) SMA/MA Kecil atau Terbuka
  - d) Pendidikan Jarak Jauh

2. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)
  - a) Pelatihan Budi Daya Hortikultura dan Palawija
  - b) Pelatihan menjahit dan Bordir
  - c) Pelatihan komputer
  - d) Pelatihan Otomotif
  - e) Pelatihan Rias Kecantikan
  - f) Pelatihan seni dan budaya
  - g) Pelatihan Pertukangan
  - h) Pelatihan budi daya peternakan ikan
3. Pendidikan Keagamaan:
  - a) Bimbingan Mental dan Akhlak Mulia
  - b) Taman Pendidikan Agama (TPA)
  - c) Mengajian Keagamaan untuk Umum
  - d) Konsultasi Keagamaan

#### **4.1.7. Program Kegiatan**

Program-program yang dilaksanakan Bina Anak Pertiwi adalah sebagai berikut:

##### **1. Bimbingan Agama dan Etika Bermasyarakat**

Program ini dalam rangka membangun sikap mental positif, dan menumbuhkan kembali semangat keberagaman warga belajar. Bentuk kegiatannya berupa bimbingan ibadah praktis seperti wudhu, shalat, puasa, dan lain-lain.

- a) Mengaji Al Qur'an
- b) Pengajian tentang budi pekerti (akhlak)
- c) Fiqih (pengajian tentang tata cara bersuci, najis, halal haram, dll.)
- d) Penyuluhan tata cara hidup bermasyarakat
- e) Pelatihan Khusus Ramadhan (Pesantren Ramadhan).

##### **2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan.**

- a) Pendidikan, kegiatan ini diadakan dalam rangka mengembalikan anak didik ke dalam suasana belajar kembali.



Bentuk Kegiatan:

1. Pendidikan Persekolahan, merupakan layanan pendidikan bagi anak daerah terpencil, penyelenggaraannya berupa:
    - a. SD Kecil
    - b. SMP/MTs Kecil atau Terbuka
    - c. SMA/MA Kecil atau Terbuka
    - d. Pendidikan Jarak Jauh
  2. Menyekolahkan anak kembali ke sekolah umum  
Diperuntukkan bagi anak yang sudah mengalami perubahan sikap mental, serta memiliki motivasi dan minat belajar yang besar, serta masih memungkinkan diterima di sekolah umum.
- b) Keterampilan Kerja dan Kursus

Jenis keterampilan yang diberikan adalah keterampilan kerja praktis dan tidak memerlukan legalitas formal akademis serta mudah dilakukan. Dan jenis keterampilan tersebut berorientasi kerja atau terbukanya lapangan kerja baru.

Bentuk kegiatan:

Pelatihan:

- a) Magang kerja (di perkebunan Sukabumi)
- b) Pelatihan manajemen usaha
- c) Pelatihan Manajemen produksi
- d) Pelatihan manajemen quality control
- e) Pelatihan manajemen pemasaran dan distribusi
- f) Kelompok usaha produktif.

Kursus-kursus:

- a) Kursus Setir mobil (dapat SIM)
- b) Kursus komputer
- c) Kursus montir motor
- d) kursus menjahit
- e) Kursus tata boga
- f) Kursus Sablon

g) Kursus Produksi Sandal dan sepatu

### **3. Pengembangan Minat dan Bakat (Seni Budaya)**

Kegiatan ini difokuskan untuk menggali bakat seni yang ada dalam diri anak didik.

Bentuk Kegiatan:

- a) Grup Musik
- b) Sanggar tari
- c) Teater
- d) Musikalisasi puisi

### **4. Kesejahteraan dan Pelayanan Kesehatan**

Program ini ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kesehatan Warga Binaan dan masyarakat luas.

Bentuk Kegiatan:

- a) Penyuluhan kesehatan (Reproduksi, TBC, HIV, Kesehatan Masyarakat)
- b) Pemberian makan bergizi
- c) Pemeriksaan dan Pengobatan kesehatan berkala
- d) Pelayanan kesehatan serta pembiayaan kesehatan (Sertifikat Sehat Dinkes DKI)
- e) Pelayanan kesehatan anak dan keluarga anak jalanan
- f) Bantuan kesehatan untuk keluarga miskin (dhuafa)

### **5. Pengembangan Usaha Mandiri**

Program ini dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja baru.

Bentuk Kegiatan:

- a) *Home industry* sandal sepatu dan hotel
- b) Budi daya belimbing manis
- c) Bengkel (servis) motor
- d) Warung kelontong
- e) Koperasi
- f) Jenis-jenis kerajinan tangan anak asuh

## **6. Aksi Sosial/Kemanusiaan**

Kegiatan ini adalah spontanitas dalam rangka meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah.

Bentuk kegiatan:

- a) Pemberian nasi bungkus selama musibah berlangsung
- b) Penyaluran pakaian layak pakai
- c) Penyaluran sembako
- d) Penyaluran peralatan masak (dapur)
- e) Penyaluran pakaian seragam sekolah

### **4.1.8. Sasaran Warga Binaan**

Masyarakat yang menjadi sasaran kami adalah anak-anak putus sekolah, anak jalanan atau terlantar, serta anak kurang mampu. Anak-anak tersebut sama sekali tidak dibebani biaya apapun, bahkan kebutuhan pembelajaran seperti alat-alat tulis seluruhnya disediakan oleh penyelenggara. Jadi anak cukup hanya datang dan belajar.

### **4.1.9. Rekrutmen Warga Binaan**

Pola rekrutmen yang dilakukan adalah dalam bentuk penjangkauan atau kunjungan lapangan, pengamatan, kemudian rekrutmen. Pola yang kami kembangkan pada tahap penjangkauan ini adalah “bermain bersama”. Pekerja Sosial atau pun pembina lainnya pro-aktif mengamati kecenderungan, minat, serta hobi anak jalanan/terlantar yang kemudian dikemas dalam bentuk permainan serta pertandingan. Misalnya, bermain bola yang kemudian pembentukan tim untuk menjaga kelangsungan komunikasi dengan anak jalanan atau terlantar.

Pola bermain ini ternyata sangat efektif dalam menjangkau anak jalanan atau terlantar. Karena dengan bermain bersama, komunikasi terjalin lebih hangat, dan anak merasa kehadirannya diakui sehingga tercipta sebuah ruang komunikasi yang lebih terbuka, akrab dan egaliter. Keakraban yang terjalin tercermin sebagaimana antar seorang sahabat dengan lainnya sehingga situasinya sangat cair. Pola rekrutmen

seperti ini terbangun secara berantai dan tanpa disadari dilakukan juga oleh anak jalanan atau terlantar, yaitu, membawa teman lainnya untuk bergabung bermain bersama. Dan tidak jarang pertandingan dilakukan antara kelompok anak jalanan atau terlantar melawan kelompok pembina.

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Pelaksanaan Advokasi Sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi**

Advokasi sosial merupakan suatu pertolongan dalam melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan. Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan suatu pertolongan untuk memberikan perubahan kepada anak-anak binaannya dengan memperjuangkan hak atas identitasnya untuk mencapai hak-hak anak yang lainnya. Berdasarkan teori dinamika proses advokasi menurut Adi Fahrudin (2019) terdapat lima tahapan pada proses advokasi sosial yang dilakukan secara bersamaan atau berurutan dan dapat berhenti atau dilakukan berbalik. Dalam melakukan advokasi sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki beberapa tahapan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Bina Anak Pertiwi. Lima tahapan dalam proses advokasi sosial yaitu:

#### **1. Mengidentifikasi Masalah**

Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memberikan bantuan kepada anak-anak yang kehilangan haknya, mayoritas anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi berlatar belakang anak jalanan sehingga orang tua mereka lebih memprioritaskan perihal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya sehingga mereka kehilangan haknya seperti hak atas identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi, dan hak untuk mendapatkan makanan.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Banyak anak-anak yayasan kita yang bekerja di jalanan ya mereka itu sebagai badut, alibi nya menjual tisu atau koran gitu. Jadi mayoritas itu anak-anak jalanan ya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan lembaga untuk memperoleh hak-haknya terutama sih hak pendidikan dan hak identitasnya karena mereka kan hidup di jalanan.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

Hal ini di dukung oleh Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Jenis masalah yang awalnya kita tangani itu anak-anak jalanan kak yang kehilangan hak-hak mereka, tapi seiring berjalannya waktu tidak hanya dari anak-anak jalanan aja. Jadi ada yang dari keluarga kurang mampu seperti orang tuanya bekerja sebagai badut, ART, supir atau pedagang starling kak. Yang penting tujuan utama nya itu anak ingin belajar sebelum masuk sekolah formal namun terkendala biaya ataupun terhambat karena tidak memiliki identitas.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

Dalam mengidentifikasi masalah memiliki tujuan untuk menggali data dan mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak binaan sehingga mudah dalam mengambil tindakan kebijakan. Sebagai advokat juga harus menentukan masalah yang perlu dituju dan memerlukan tindakan. Asesmen yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data. Wawancara tersebut dilakukan oleh pengurus Yayasan Bina Anak Pertiwi dengan anggota keluarga anak binaan dan lingkungan terdekat anak binaan seperti teman dan tetangga. Hal ini untuk

mempermudah proses penggalan data dan melihat kebenaran data yang diberikan.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 4 berikut:

*“Jadi kita asesmen terlebih dahulu dilihat bagaimana kondisi kehidupannya dan kita juga bertanya kepada anak binaan lainnya yang mengenal calon anak binaan tersebut apakah betul informasi yang diberikan sama atau tidak. Setelah itu, kita survei kerumahnya. Pihak yayasan yang survei langsung kerumah anak tersebut dan dilakukannya asesmen, kita lihat apa permasalahan yang dialami anak tersebut misalnya tidak memiliki akta kelahiran, KK, atau KTP dan setelah itu kita bantu.”* (Hasil wawancara pada tanggal 4 Juni 2023 dengan Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Hal ini didukung oleh Informan 1:

*“Kita asesmen melakukan wawancara dengan orang tuanya tentang ekonominya seperti apa dan melihat kelayakan juga ya, lalu kita tanya identitas apa aja yang mereka ga punya alesannya apa dan masalahnya seperti apa. Selain itu, kita juga sambil motivasi untuk orang tua nya mau bikin karena percuma kita mau bantu tapi mereka itu tidak ada kemauan untuk bikin jadi ga bisa. Untuk yang terlibat itu kami ada tim nya koordinator anak dan warga binaan.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Salah satu alasan anak binaan tidak memiliki identitas lengkap karena mayoritas anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi tinggal di daerah yang rawan banjir sehingga berkas-berkas penting terbawa hanyut oleh banjir. Hal ini disebabkan juga karena keluarga yang merantau sehingga harus mengurus berkas secara langsung ke

kampung halaman nya namun terkendala biaya untuk transportasi nya. Di sisi lain, masih banyak orang tua yang awam mengenai pentingnya identitas bagi anak sehingga mereka hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dengan bekerja di jalanan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi selaku Informan 2:

*“Jadi ada 3 penyebab anak binaan itu tidak memiliki identitas diri yaitu:*

- 1. Keterbatasan orang tua, kalau ayah nya supir dan ibu nya bekerja di pinggir jalan, pikiran mereka KUA mahal jadi lebih baik kawin aja dulu. 1 perempuan itu bisa punya 5 suami itu karena kawin cerai dan kembali dengan uang mereka. Menurut saya, tidak berfikir panjang kedepan karena kalau mereka mau enaknya saja ya harus bersusah-susah juga untuk memperhatikan anak mereka karena saat ini surat-surat itu penting.*
- 2. Orang tua yang merantau ke Jakarta, nah karena orang tua terkendala ekonomi sehingga harus merantau ke Jakarta akibatnya ada beberapa perkawinan yang tidak tercatat.*
- 3. Terkena musibah contohnya seperti terbawa arus banjir, karena banyak anak binaan yayasan yang tinggal di kawasan rawan banjir dan ketika banjir itu kan dadakan sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan surat-surat tersebut. Sebetulnya, kalau hanya hilang saya mudah cara membuatnya dengan cara datang ke DUKCAPIL atau ke Kelurahan karena mereka pasti memiliki data nya dan tinggal di cek. Tapi ada yang orang tua nya merantau sehingga mereka mengeluh untuk biaya transportasi ke kampung nya yang mahal misalnya ke Jawa karena bikin*

*data nya disana.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Informan 1 dan Informan 5 bahwa:

*“Penyebab nya itu ada 2 yaitu:*

1. *Mereka merantau ke Jakarta tapi ga mengurus identitas dan males-malesan, kalau dulu masih manual dan sekarang sudah elektronik sehingga data mereka hilang sampai anak tidak punya akta kelahiran karena orang tuanya tidak punya kartu keluarga.*
2. *Orang tuanya menikah sirih secara agama sah namun secara negara tidak sah sehingga mereka menyepelkan itu yang penting yang penting bisa makan, nyari duit dan punya anak.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

*“Jadi kebanyakan rumahnya di dekat kali kak kan sering banget banjir ya, kadang ga terlalu deres aja itu bisa banjir. Nah itu penyebabnya kak termasuk saya juga gitu karena kena banjir berkas-berkas saya hilang.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Informan 5 selaku Penerima Manfaat)

## **2. Merumuskan Solusi**

Melihat permasalahan yang dialami anak, sebagai orang tua tidak dapat tinggal diam sehingga beberapa orang tua mencari solusi agar anak mampu sekolah dan mendapatkan identitas dengan meminta bantuan kepada Yayasan Bina Anak Pertiwi agar anak mereka dapat sekolah secara gratis sesuai dengan teman seusianya



dan dibantu dalam proses pemenuhan hak anak yang lainnya. Penentuan solusi juga dilakukan bersama orang tua dengan melakukan diskusi dikarenakan orang tua juga memiliki tanggung jawab pada anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 5 selaku Penerima Manfaat bahwa:

*“Kita ngobrol-ngobrol aja kak kayak diskusi lah ya buat nemuin jalan keluarnya tapi karena saya cuma ilang aja jadi ga terlalu sulit buat ngurusnya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

Yayasan Bina Anak Pertiwi menentukan solusi yang paling mudah dan tepat untuk ditangani sehingga memudahkan pihak yayasan dalam melakukan pertolongan yang sesuai. Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan beberapa solusi dalam memperjuangkan dan membela hak-hak dalam mendapatkan haknya seperti hak atas identitas, hak pendidikan dan hak kesehatan. Ketika pihak yayasan telah mengetahui permasalahan yang dialami anak maka akan berkoordinasi dan memberikan laporan kepada sesama pengurus. Penentuan solusi dalam mendapatkan hak atas identitas bagi anak akan disesuaikan dengan kemampuan orang tua, jika orang tua mampu diberi arahan untuk membuat identitas anak maka pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi akan memberikan arahan dan pendampingan untuk mendapatkan identitas. Namun, jika orang tua memiliki kendala seperti tidak mampu membaca dan anak tersebut tidak memiliki orang tua maka pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi akan melakukan pendampingan secara langsung.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 4 berikut:

*“...dilihat apa permasalahan yang dialami anak tersebut misalnya tidak memiliki akta kelahiran, KK, atau KTP dan*

*setelah itu kita bantu sesuai dengan permasalahan yang dialami. Yang terlibat merupakan tim koordinasi di lapangan, jadi mereka yang turun langsung dengan wawancara ke beberapa lingkungan. Jadi setelah kami melihat permasalahan yang ada kami asesmen lalu kami urus langsung, jadi kami tidak perlu adanya diskusi yang dibentuk untuk menentukan solusi. Kami hanya membutuhkan koordinasi dan laporan sesama pengurus selama proses tersebut yang dilakukan melalui telepon atau WhatsApp dan bisa juga ketika bertemu langsung kami bicarakan dan kami kerjakan.” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 dengan Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)*

Hal ini juga di dukung oleh Informan 2:

*“Kita lihat dulu permasalahannya apa dan kita bahas dengan orang tua bersama-sama ya kak karena itu juga tanggung jawab orang tua anak tersebut. Jika orang tuanya memiliki identitas lengkap maka akan kami arahkan orang tua tersebut untuk mengurusnya sendiri tapi kalau orang tua nya memiliki kendala maka akan kami bantu. Contohnya seperti “A” ia sebelumnya ia tidak memiliki identitas karena tinggal bersama neneknya dan ayahnya namun orang tuanya sudah bercerai sehingga kita membantu memberikan arahan untuk menemukan solusi tersebut dengan bekerja sama oleh orang tua “A” dan pihak yayasan.”(Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)*

Salah satu tujuan advokasi untuk membantu klien dalam memperoleh haknya sehingga tujuannya memerlukan tindakan dari beberapa pihak. Dalam pelaksanaan advokasi sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki tujuan agar anak binaan mampu

mendapatkan haknya untuk bersekolah dan dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai anak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 3 selaku Wali Kelas Tas B Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Tujuan nya untuk mengembalikan fungsi sosial anak karena anak berhak mendapatkan hak-hak yang lainnya kan ga selamanya ya kak dia disini, dia juga butuh berkembang sesuai umurnya jadi dia butuh masuk ke sekolah formal. Selain itu juga untuk mendaftar jaminan kesehatan, kalau dia ga punya kan kedepannya akan sulit ya kak karena jaminan kesehatan itu.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

### **3. Membangun Kesadaran dan Kemauan Politik**

Strategi merupakan hal penting dalam pelaksanaan advokasi untuk membangun kesadaran dan menyampaikan informasi kepada orang tua mengenai pentingnya identitas bagi anak agar menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang lainnya sehingga membutuhkan strategi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Jadi terkadang itu ada orang tua yang malas mengurus identitas anak bahkan untuk saya arahkan saja itu sulit tapi yang menjadi kesadaran lembaga adalah kita harus memberikan pelayanan bagi orang yang mendapat ketiadilan tersebut dan yang menjadi korban adalah anak sehingga Yayasan Bina Anak Pertiwi bekerja sama dengan RT RW setempat untuk membantu proses dalam membuat identitas tersebut. Disamping itu, pihak yayasan juga harus terus mengarahkan dan memberikan motivasi kepada orang tua tersebut untuk ikut membantu atau berjuang dalam proses*

*tersebut untuk memberikan perubahan kepada anaknya agar mendapat hak-hak yang lainnya karena hak atas identitas itu sangat penting ya untuk menunjang hak-hak anak lainnya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

Pernyataan ini didukung oleh Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Jadi kita memperjuangkan hak-hak anaknya seperti hak untuk mendapatkan identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Peran kami yang utama itu memberikan edukasi dulu kepada orang tua bahwa identitas adalah hal penting dan kita memberikan pelayanan untuk anak-anak yang kehilangan haknya dapat belajar sesuai dengan seusianya tanpa dipungut biaya...”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan kerja sama dengan pihak eksternal sehingga relasi yang dijalin harus baik dengan pihak RT dan RW, Kelurahan, DUKCAPIL, Puskesmas, dan PKBM untuk pelaksanaan kejar paket di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Kerja sama yang dibangun harus baik karena untuk memperjuangkan hak anak dengan bertindak membentuk kerja sama yang kuat dan berkoordinasi untuk mempermudah proses pelaksanaan advokasi. Koordinasi yang dibangun dengan memberikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan advokasi sehingga pihak-pihak terkait membantu dengan baik bahkan mempermudah dalam proses pertolongan. Kinerja yang dilakukan oleh *stakeholder* dapat dikatakan baik, hal ini karena relasi yang dibangun dapat dikatakan baik. selain itu, karena *stakeholder* memiliki rasa kemanusiaan sehingga mempermudah proses pertolongan.

Berdasarkan informasi yang dikatakan oleh Informan 2 bahwa:

*“Salah satunya kita bekerja sama dengan RT RW setempat, Kelurahan, DUKCAPIL, dan salah satu PKBM yang bekerja sama dengan kami. Untuk jaminan kesehatan sendiri kita bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Kita terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama dan bernegosiasi terkait mengatasi permasalahan anak binaan yang belum memiliki identitas sehingga harus membangun komunikasi yang baik kepada beberapa pihak tersebut.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Pernyataan ini didukung oleh ungkapan Informan 1 dan 4 bahwa:

*“...kita tetap bekerja sama dengan pemerintahan ya RT, RW, Kelurahan, DUKCAPIL. Kita menjalin komunikasi yang baik sehingga mereka juga mau ngebantu kita, selain itu kita juga utamakan koordinasi dengan atasan lembaga pemerintahan tersebut karena ini kita membahas tentang hak anak ya udah jelas di UU KHA itu jadi mereka harus membantunya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

*“Kita saling koordinasi aja kak dengan pihak-pihak yang terlibat dan saling melapor kekurangannya apa gitu. Selain itu, karena mereka melihat anak binaan yang dibantu merupakan anak yang aktif dan semangat dalam belajar maka pihak-pihak tersebut dapat membantu dengan baik. Kinerja mereka juga cukup baik kak, jadi istilahnya ya gerakannya cepet ya. Contohnya Pak Ali mau mengurus surat keterangan ke Kelurahan, nah kita hanya followup melalui WhatsApp aja kak bahwa ada warga yang tidak memiliki KTP atau akta kelahiran dan meminta bantuan kepada pihak Kelurahan.”*

*Setelah berkas itu jadi nanti pihak Kelurahan yang mengantarkannya ke Yayasan dan pihak-pihak terkait sudah saling koordinasi dengan baik dengan Ketua RW, Ketua RT dan pihak Kelurahan setempat. Jadi setiap wilayah itu ada penanggung jawabnya kak sehingga mempermudah proses koordinasinya. Selain itu juga pihak-pihak yang terkait dalam membantu proses advokasi ini memiliki rasa iba terhadap anak binaan setelah melihat hasil asesmen yang telah dijalankan maka mereka membantu dan memperjuangkan hak anak tersebut.”* (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 dengan Informan 4 selaku Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)

#### **4. Melaksanakan Kebijakan**

Setelah solusi telah ditentukan dalam permasalahan yang dialami, maka dapat dilakukan pelaksanaan kebijakan untuk bertindak sehingga dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dialami. Walaupun dalam pelaksanaannya itu berbeda-beda namun semua pelayanan yang diberikan kepada anak binaan sama dan tidak pilih kasih sehingga tidak dibeda-bedakan dalam memberikan bantuan. Jika anak binaan memiliki kelengkapan berkas kartu keluarga, KTP kedua orang tua dan surat nikah kedua orang tuanya maka proses pembuatan akta kelahiran mudah.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 1:

*“Yang pertama itu kita mengedukasi orang tua bahwa identitas itu penting untuk memastikan bahwa identitasnya itu betul adanya dan menjadi perlindungan bagi anak tersebut. Yang kedua, pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan, kalau akta kelahiran syaratnya itu surat keterangan RT dan RW, surat nikah orang tua, surat keterangan lahir, KTP kedua*

*orang tua dan KK. Yang ketiga itu pendampingan dalam proses membuat identitas dari pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi yang turun langsung dalam membantu termasuk dalam pembuatan KIA ya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Hal ini di dukung juga oleh Informan 2:

*“Jadi kita memperjuangkan hak-hak anaknya seperti hak untuk mendapatkan identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Peran kami yang utama itu memberikan edukasi dulu kepada orang tua bahwa identitas adalah hal penting dan kita memberikan pelayanan untuk anak-anak yang kehilangan haknya dapat belajar sesuai dengan seusianya tanpa dipungut biaya setelah itu kami melakukan arahan dan membantu orang tua untuk mendapatkan identitas anak... Untuk hak kesehatan kami membuat jaminan kesehatan yang tidak berbayar ya itu kami buat untuk mempermudah dan meringankan beban orang tua dan bekerja sama dengan pihak Puskesmas.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Kinerja yang dilakukan oleh *stakeholder* dapat dikatakan baik, hal ini karena relasi yang dibangun oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi baik dan *stakeholder* melihat kondisi yang dialami anak binaan sehingga mempermudah proses pelaksanaannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Informan 2 bahwa:

*“Salah satunya kita bekerja sama dengan RT RW setempat, Kelurahan, DUKCAPIL, dan salah satu PKBM yang bekerja*

*sama dengan kami. Untuk jaminan kesehatan sendiri kita bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Kita terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama dan bernegosiasi terkait mengatasi permasalahan anak binaan yang belum memiliki identitas sehingga harus membangun komunikasi yang baik kepada beberapa pihak tersebut.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Pernyataan ini serupa dengan yang dikatakan oleh Informan 4 selaku Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi:

*“Jadi kita mengurus ke RT RW setempat, ke Kelurahan dan ke DUKCAPIL. Kalau data anak binaan itu lengkap sangat mudah, apalagi sekarang kita bisa membuat online. Proses pembuatan akta kelahiran itu ± 60 hari. Contohnya Pak Ali mau mengurus surat keterangan ke Kelurahan, nah kita hanya followup melalui WhatsApp aja kak bahwa ada warga yang tidak memiliki KTP atau akta kelahiran dan meminta bantuan kepada pihak Kelurahan. Setelah berkas itu jadi nanti pihak Kelurahan yang mengantarkannya ke Yayasan dan pihak-pihak terkait sudah saling koordinasi dengan baik dengan Ketua RW, Ketua RT dan pihak Kelurahan setempat. Jadi setiap wilayah itu ada penanggung jawabnya kak sehingga mempermudah proses koordinasinya. Selain itu juga pihak-pihak yang terkait dalam membantu proses advokasi ini memiliki rasa iba terhadap anak binaan setelah melihat hasil asesmen yang telah dijalankan maka mereka membantu dan memperjuangkan hak anak tersebut.”* (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 dengan Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)



Selama proses pelaksanaan berlangsung, pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan peninjauan secara terus menerus mengenai perkembangan yang telah dilakukan oleh stakeholder yang berada di pemerintahan. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan telah di proses dan melihat sejauh mana perkembangannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1 bahwa:

*“Kita terus follow up ke bagian pemerintahan dan kita juga negosiasi langsung ke bagian atasannya bahwa ini adalah hak anak, kadang juga nanti mereka sendiri yang mengantarkan berkas itu ke yayasan langsung atau mengirimkan melalui WhatsApp. Kita juga terus”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Intervensi pada anak binaan yang tidak memiliki identitas maka prosesnya lebih rumit sehingga proses pelaksanaannya berbeda dengan anak yang sudah memiliki beberapa identitas. Intervensi yang diberikan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu menumpang di salah satu kartu keluarga yang mampu bertanggung jawab seperti keluarga terdekatnya paman atau bibi nya.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Namun, kalau yang tidak punya identitas sama sekali maka prosesnya itu terbalik jadi keluarga anak tersebut masing-masing numpang di KK orang lain namun tetap anak dari seorang ibu kandung nya di akta kelahirannya, setelah itu orang tua membuat KTP dan mengurus surat keterangan lahir anak serta surat nikah.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

## 5. Evaluasi

Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektifitas advokasi yang telah dilakukan dan melihat tingkat keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan advokasi. Yayasan Bina Anak Pertiwi tidak melakukan kegiatan evaluasi secara terstruktur namun hanya melihat database jika anak tersebut sudah memiliki identitas lengkap maka tujuan advokasi telah tercapai. Jika belum berjalan dengan baik maka akan terus memperbaikinya hingga menemukan solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi beliau mengungkapkan bahwa:

*“Kita hanya melihat database tadi kalau anak itu sudah punya maka tujuan kita tercapai, kalau belum ya kita lanjutkan. Kalau bidang pendidikan itu biasanya dengan guru-guru ada tapi tidak terjadwal.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

Hal ini di dukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Informan 2 dan 3 bahwa:

*“Biasanya ada kami melakukan evaluasi dengan Ketua Yayasan tapi tidak terjadwal. Evaluasi ini kita lakukan untuk melihat apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum gitu kak, jika belum maka kita memperbaikinya dan terus berusaha untuk menemukan solusinya.”* (Hasil wawancara pada tanggal. 6 Juni 2023 dengan Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Advokasi sosial terhadap pemenuhan hak anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki tingkat keberhasilan dengan melihat anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi sudah terpenuhi hak-haknya atau belum seperti hak atas identitas bahwa anak itu

mendapatkan identitasnya berupa akta kelahiran dan masuk ke dalam KK dengan memperoleh NIK, hak pendidikan yaitu anak binaan dapat belajar sesuai dengan teman sebayanya tanpa terhambat ekonomi dan sedangkan hak kesehatan yaitu anak binaan dapat memperoleh hak jaminan kesehatan.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 3:

*“Untuk pencapaiannya itu anak masuk sekolah formal karena ketika anak bisa masuk sekolah formal kan berarti identitasnya udah ada dan hak pendidikan nya dia terpenuhi maksudnya mampu sekolah lah gitu kak, sebelum masuk sekolah kan mereka disini jadi ya hak pendidikan mereka di yayasan ini bisa terpenuhi kak karena mereka kan terhambat biaya untuk sekolah ya jadi sebisa mungkin yayasan memberikan yang terbaik agar anak-anak semangat mencapai cita-citanya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Wali Kelas Tas B)

Hal ini didukung oleh Informan 2:

*“Indikator keberhasilan bagi kami itu ketika anak-anak memiliki semangat belajar dan peduli terhadap pendidikan bahwa itu penting. Selain itu juga anak-anak bisa masuk sekolah formal karena anak-anak tidak mungkin terus menerus belajar disini kak agar mereka terus berkembang ilmu nya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

#### **4.2.2. Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi**

Setiap manusia yang hidup memiliki hak dan kewajiban, tanpa terkecuali sehingga anak harus mendapat perlindungan oleh Negara, perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan usaha agar terpenuhinya hak dan kewajiban pada perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial. Pada perlindungan ini dapat mewujudkan keadilan di masyarakat di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan pada setiap anak, baik anak yang memiliki orang ataupun anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan anak terlantar. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang disahkan oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Di Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan pelayanan untuk pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan. Adapun beberapa hak tersebut yaitu:

### **1. Hak atas Identitas**

Pada hak untuk mendapat identitas, setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak masing-masing dan diperlukannya beberapa syarat seperti buku nikah orang tua, KTP kedua orang tua, surat keterangan lahir.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu:

*“Harus ada KK, di dalam KK harus ada NIK nya jadi saling bersangkutan. Walaupun untuk membuat KK itu ada akta kelahiran tapi tidak ada surat nikah maka tidak bisa. Kalau syarat pembuatan akta kelahiran itu surat keterangan lahir, KK, KTP kedua orang tua dan buku nikah.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Informan 4:

*“Yang saya tahu itu KTP orang tua, KK, dan buku nikah orang tua. Kalau pernah memiliki namun hilang itu kita bantu untuk mengurus surat keterangan kehilangan ke kepolisian lalu ke*

*DUKCAPIL.*” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 dengan Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan pertolongan dengan memberikan 2 pilihan yaitu berupa dana dan pendampingan secara langsung. Jika orang tua mampu mengurus sendiri namun terhambat biaya maka pihak yayasan memberikan fasilitas dengan memberikan dana semampunya untuk pembuatan identitas. Selain itu, pendampingan langsung diberikan ketika orang tua mengalami hambatan dalam membaca dan orang tua anak binaan sudah tidak ada lagi maka pihak Yayasan Bina Anak Pertiwi akan memberikan pertolongan secara langsung.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi:

*“Kita ada 2 bantuan ya jadi yang pertama dana dan diurus langsung oleh pihak yayasan.*

#### *1. Dana*

*Orang tua mengurus sendiri dan pihak yayasan membantu dana semampunya saja. Dana yang diberikan tidak sembarangan dan harus dilihat dulu orangnya gimana apakah mampu atau tidak dalam pembuatan akta kelahiran. Contohnya seperti Pak Ali pernah membantu ke salah satu orang tua murid uang 300.000 untuk biaya transportasi ke kampung, tetapi tidak diurus. Entah itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau yang lain. Kalau untuk ekonomi anak binaan tahun ini, orang tuanya cukup lumayan ekonominya seperti ayahnya bekerja sebagai supir dan ibunya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).*

## 2. Diurus oleh Pihak Yayasan

*Hal ini dengan ketentuan orang tua tidak dapat membaca sama sekali dengan keterbatasan kemampuan orang tuanya dan awam terhadap informasi mengenai cara pembuatannya. Sebetulnya, pembuatan akta dan KK bisa melalui online tetapi untuk pengambilannya dapat mengambil langsung.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)*

Setiap anak memiliki permasalahannya yang berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan advokasinya juga berbeda, di Yayasan Bina Anak Pertiwi terdapat anak binaan yang orang tuanya tidak memiliki identitas sama sekali maka intervensi atau pelaksanaan advokasinya berbeda dan prosesnya lebih rumit dengan cara anak dan keluarganya menumpang di kartu keluarga orang lain yang mampu bertanggung jawab namun di akta kelahiran anak nantinya tetap anak dari seorang ibu kandung nya. Setelah anak tersebut dewasa dan sudah memiliki identitas seperti KTP maka nanti akan disatukan kembali nama anggota keluarga tersebut yang menumpang di kartu keluarga orang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi:

*“Namun, kalau yang tidak punya identitas sama sekali maka prosesnya itu terbalik jadi keluarga anak tersebut masing-masing numpang di KK orang lain namun tetap anak dari seorang ibu kandung nya di akta kelahirannya, setelah itu orang tua membuat KTP dan mengurus surat keterangan lahir anak serta surat nikah. Jika salah satu orang tua nya punya identitas misalnya ibu maka bisa dibuatkan nya akta kelahiran dengan ketentuan anak dari seorang ibu bukan anak dari seorang ayah dan ibu. Jika kedua orang tuanya tidak memiliki*

*identitas sama sekali seperti KTP, KK, surat nikah seperti itu maka anak tersebut menumpang di KK orang lain yang bisa bertanggung jawab dan terjadi di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Ada beberapa permasalahan identitas orang tua yang tidak lengkap sehingga anak terkendala dalam proses pembuatan akta kelahiran. Untuk mempermudah saya memperbolehkan anak binaan untuk masuk ke dalam KK saya namun tidak sembarangan orang karena jika anak tersebut melakukan tindak pidana maka keluarga saya akan terkena imbasnya. Jadi walaupun orang tersebut umur 20 tahun, 30 tahun atau umur berapapun itu bisa dibuat akta kelahirannya tetapi tetap anak tersebut anak dari seorang ibu kandungnya bukan nama istri saya. Kalau anak tersebut numpang KK dengan keluarga terdekatnya misalnya om nya lalu orang tua nya juga belum punya identitas maka orang tua nya ikut menumpang di KK orang lain, nanti jika anak itu sudah berumur 17 tahun atau 19 tahun dan punya identitas yaitu KTP dan nanti baru disatukan dengan membuat KK baru di keluarga nya anak tersebut. Jika terdapat masalah bahwa orang tua tidak memiliki buku akta nikah maka kedua orang tua anak tersebut menikah lewat sidang isbat, ya memang prosesnya itu agak ribet.” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)*

Hasil wawancara tersebut di dukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Informan 2 dan 3 bahwa:

*“Biasanya mereka masuk ke dalam KK orang terdekatnya seperti om atau tante nya. Kalau tidak ada nanti bisa menumpang ke KK Pak Ali jadi masuk menjadi anggota keluarga Pak Ali di dalam KK tersebut. Contohnya seperti “A” kita sudah mencarikan solusi namun belum menemukan jalan keluarnya karena orang tua nya sudah bercerai dan “A”*

*tinggal bersama ayah dan neneknya namun ibunya sudah bekeluarga sehingga "A" dibantu untuk pembuatan identitas dan identitasnya masuk ke dalam KK Pak Ali nanti kalau sudah memiliki KTP maka akan dipecah identitas "A".*" (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

*"Jadi kita liat dia permasalahannya apa, salah satu contoh "A" ga punya identitas dia itu tinggal sama nenek dan ayahnya jadi yang ngurusnya itu neneknya dari kecil. Dia ini punya surat keterangan lahir tapi ga punya KK karena orang tua nya udah cerai dan ayahnya masih masuk ke KK neneknya. Jadi "A" harus masuk ke KK siapa dulu nih gitu, kita cariin orang yang bisa dan mau nanti baru deh dipecah gitu."* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Wali Kelas Tas B)

Di Yayasan Bina Anak Pertiwi terdapat permasalahan bahwa ada beberapa orang tua yang menikah secara tidak resmi atau menikah sirih sehingga bantuan yang diberikan berupa arahan untuk orang tua tersebut menikah secara resmi yang diakui oleh negara.

Sebagaimana yang disampaikan saat wawancara dengan Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*"Jadi dari pihak yayasan memberikan arahan dan informasi bahwa harus memiliki surat-surat sehingga harus menikah lagi secara resmi di KUA agar ada bukti akta nikah dan mempermudah anak dalam proses pembuatan sura-surat lainnya. Kecuali, orang tua memiliki keterbatasan seperti membaca maka pihak yayasan memberikan pendampingan dalam proses tersebut."* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)



Penyataan ini di dukung oleh Informan 1 selaku Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi:

*“Jika terdapat masalah bahwa orang tua tidak memiliki buku akta nikah maka kedua orang tua anak tersebut menikah lewat sidang isbat, ya memang prosesnya itu agak ribet.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

## **2. Hak Pendidikan**

Pada hak pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membeda-bedakan. Anak berhak sekolah selama 12 tahun dan mendapatkan pendidikan yang layak. Di Yayasan Bina Anak Pertiwi terdapat beberapa kelas sesuai dengan kategori umur seperti kelas tas A dari umur 5-7 tahun, tas B 8-12 tahun dan di kelas ini mayoritas awalnya belum memiliki identitas sehingga terhambat ketika masuk sekolah formal, dan kejar paket A dari umur 12-18 tahun. Proses pembelajaran mengacu pada buku-buku sekolah sehingga buku pelajaran menjadi pedoman dalam pembelajaran. Di kelas tas B berfokus pada pelajaran SD dan masuk sekolah sebanyak 2 – 3 kali dalam seminggu dengan waktu 2 – 3 jam. Fasilitas pendidikan yang dimiliki Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu terdapat 2 ruang kelas untuk tas B dan kejar paket dan 1 ruang aula yang sekaligus menjadi ruang kelas tas A. Selain itu, anak binaan mendapat alat tulis sehingga anak-anak hanya datang mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di yayasan.

Seperti yang disampaikan saat wawancara dengan Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu:

*“Jadi ada tas A yaitu PAUD ya dari umur 5-7 tahun, tas B itu umur 8-12 tahun dan kejar paket A dari umur ± 12 – 18 tahun. Masing-masing kegiatan pembelajaran dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu dengan waktu 2 – 3 jam pembelajaran.”*

*Untuk kelas tas B itu mengacu pada buku-buku sekolah, jadi guru nya itu memiliki buku pelajaran sebagai pedoman. Untuk fasilitas pendidikan sendiri kita ada ruang kelas masing-masing itu satu ya dan ruang aula yang cukup lumayan dan bagus ya ruangnya. Selain itu juga mereka mendapatkan fasilitas alat tulis jadi anak-anak hanya datang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di yayasan. Dikelas tas B mereka belajar tidak pakai kelas 1, 2, 3 SD gitu ya. Jadi, Bu Reni itu ngajarnya pelajaran kelas 1 kalau sudah bisa naik kelas 2. Kalau kelas 2 sudah bisa naik kelas 3, jadi menyesuaikan kemampuan anak-anak di kelas tas B dan nanti mereka akan kejar paket di kelas 6 yaitu umur 12 tahun. Di umur 12 tahun nanti mereka punya hak untuk dimasukkan ke kejar paket, tetapi kalau belum 12 tahun belum bisa karena nanti harus berbayar.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)*

Hal ini serupa dengan pernyataan dari Informan 3:

*“Awalnya itu cuma ada PAUD sama kejar paket tapi karena dulu itu banyak murid yang belum punya identitas itu dimasukkin kelas PAUD dan daya tangkapnya beda sama teman dikelasnya nanti dan kalau masuk kejar paket itu terlalu tinggi materi-materinya sehingga dibuatlah kelas tas B ini kak dari kelas 1 – 4 SD seperti matematika, bahasa indonesia, IPA gitu kak. Kalau agama itu kadang anak-anak suka lupa materinya kak seperti rukun iman, rukun islam dan hafalan surat pendek tapi kalau anak yang ngaji di luar itu biasanya mereka terbiasa jadi lebih mudah kak. Di kelas tas B ini fokus untuk belajar pelajaran SD, masuknya itu 2-3 kali dalam seminggu. Jadi setelah mereka siap dan mau masuk ke tahun ajaran baru pas kenaikan kelas gitu, nanti mereka harus ujian*

*kelulusan SD kak ujian paket. Jadi disiapin guru yang khusus paket ngajar anak-anak disini kak, mereka ngebahas materi-materi yang akan diujikan. Jadi kita kerja sama dengan salah satu PKBM yang ada di daerah yaitu Citayem. Setelah mereka ujian itu nanti mereka baru daftar untuk masuk ke sekolah formal SMP.” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Wali Kelas Tas B)*

Hasil wawancara tersebut dirasakan oleh Informan 5 selaku Penerima Manfaat yaitu:

*“Saya udah bersyukur banget udah di bantu yayasan karena sangat membantu ya kak, anak saya 3 disekolahkan disini tanpa mengeluarkan biaya malah kita sering dapat bantuan sembako. Kalau dimana-mana itu pasti ada pengeluaran uang walaupun ga besar pasti itu ada tapi kalau disini ga ada sama sekali, ada acara pun dari mahasiswa atau donatur semua pasti kebagi rata kak jadi ga ada yang iri-irian. Untuk pelayanan juga menurut saya sangat bagus karena semua guru dan pengurus saling kerja sama membantu.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)*

### **3. Hak Kesehatan**

Pada hak kesehatan, setiap anak berhak mendapatkan pelayanan maupun jaminan kesehatan yang layak dan harus dilayani secara baik. Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan lembaga yang memenuhi hak kesehatan pada dengan mendaftarkan anak binaan untuk mendapat jaminan kesehatan yaitu BPJS yang PBI dengan mendatangi Puskesmas langsung menyesuaikan dengan domisili KTP yang terdaftar. Fasilitas kesehatan yang ada di Yayasan Bina Anak Pertiwi sebelumnya memiliki klinik yang diberikan oleh donatur namun karena pandemi covid 19 sehingga fasilitas tersebut dicabut. Maka untuk fasilitas kesehatan yang diberikan oleh

Yayasan Bina Anak Pertiwi hanya terdapat kotak obat namun seadanya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 1:

*“Mayoritas anak binaan saya daftarkan BPJS yang PBI yaitu Penerima Bantuan Iuran, jadi kita langsung datang aja ke Puskesmas yang penting anak punya NIK jadi yang utama itu. Untuk fasilitas kesehatan nya sendiri sesuai dengan domisili KTP yang terdaftar.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Pernyataan ini di dukung oleh Informan 2:

*“Iya kak, kita membantu dalam pembuatan KIS gratis dari pemerintah dan bantuan ini untuk orang-orang yang tidak mampu tetapi bantuan ini hanya untuk orang-orang yang tidak memiliki surat-surat lengkap karena pemerintah pun juga butuh data. Kalau data-data mereka lengkap maka yang kita lakukan awal adalah masuk sekolah formal setelah itu mereka akan membuat jaminan kesehatan langsung seperti KIS. Ada kasus kak jadi salah satu ibu-ibu dari anak binaan kami yang harus melahirkan seorang anak dengan cara caesar namun tidak memiliki biaya. Akhirnya, diurus oleh Pak Ali untuk dibantu mendapatkan BPJS dengan memberitahukan kepada orang Puskesmas bahwa Ibu tersebut orang yang tidak mampu. Sebelumnya kita punya klinik dan ada dokternya juga, ada salah satu donatur yang memberikan fasilitas tersebut namun karena pandemi covid itu donatur sudah tidak bekerja sama lagi dengan kita sampai saat ini fasilitas itu dicabut oleh mereka..”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

#### 4. Hak Rekreasi

Hak rekreasi berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1997), setiap anak berhak berekreasi untuk *refreshing* dan bebas menentukan tempat bermain yang diinginkan. Di Yayasan Bina Anak Pertiwi selain mengadakan kegiatan pembelajaran juga mengadakan kegiatan rekreasi untuk memberikan suasana baru kepada anak-anak sehingga anak binaan tidak merasa bosan. Hal ini juga berguna untuk memberikan ilmu dan pengalaman baru kepada anak-anak, tidak hanya mengenai pelajaran saja dengan melakukan rekreasi berenang. Berdasarkan hasil dokumentasi yang ditemukan di lapangan, terdapat salah satu *platform* yaitu *kitabisa.com* bersama relawan mengunjungi Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk mengajak anak-anak binaan mengikuti kegiatan *voluntrip* ke Pizza Hut untuk memberikan pengalaman dan ilmu baru kepada anak-anak membuat pizza secara langsung.

Kegiatan rekreasi dapat dilakukan dengan cara membuat proposal dan disebar melalui beberapa teman-teman pengurus yayasan dengan memberikan sebagian rezekinya kepada anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi namun seikhlasnya. Proposal tersebut menyebutkan kebutuhan anak dalam kegiatan rekreasi seperti biaya transportasi dan tiket masuk. Namun, terkadang pihak yayasan bekerja sama dengan beberapa mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar yayasan untuk memberikan pengalaman baru dan memberikan kesenangan bagi anak.

Hal ini diungkapkan oleh Informan 3 selaku Wali Kelas Tas B Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Kadang-kadang kita ngadain kegiatan di luar kak jadi biar anak-anak itu ga bosen belajar disini terus sekaligus bikin anak-anak seneng. Kalau untuk biaya nya itu kita bikin proposal yang dibagiin ke temen-temen gitu kak biasanya*

*temen umi sama pak Ali, disitu kita sebutin apa aja yang jadi kebutuhan anak-anak termasuk biaya tiket sama transportasi. Mahasiswa juga kadang ngadain kegiatan di luar kak, nanti kita juga mau ada kegiatan gimana cara membuat pizza nah itu bareng mahasiswa kak.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

Serupa dengan pernyataan yang diberikan oleh Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Kita suka ngadain kegiatan di luar ketika ada mahasiswa yang mau ngadain kegiatan atau kadang kita juga buat proposal kalau mau ngadain kegiatan karena anak juga berhak mendapat rekreasi di luar yayasan. Kalau kita mau buat kegiatan seperti berenang, kita buat proposal apa aja yang dibutuhkan anak-anak, transportasinya dan biaya masuk. Namun, untuk orang tua kita tidak membuat anggaran tersebut. Jika ada orang tua yang ingin ikut kegiatan anak-anak maka diharuskan untuk membayar mandiri. Proposal tersebut kita sebar kepada teman-teman pengurus yang ingin menyumbang seikhlasnya dan kami ngumpulkan dana tersebut untuk kegiatan anak-anak.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

## **5. Hak Untuk Mendapatkan Makanan**

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1997), pada hak untuk mendapatkan makanan ini anak berhak mendapat makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh kembang anak. Yayasan Bina Anak Pertiwi memenuhi hak tersebut dengan memberikan makanan sehat kepada anak berupa makanan yang bergizi. Makanan tersebut berasal dari donatur yang memberikan makanan sehat kepada anak-anak selama satu atau dua bulan sekali.

Hal ini berguna untuk tumbuh kembang anak sehingga mampu makan makanan yang bergizi. Selain itu juga terlihat beberapa mahasiswa sering mengadakan kegiatan di Yayasan Bina Anak Pertiwi dan memberikan beberapa makanan untuk anak-anak binaan yang mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diberikan Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Setiap 1 atau 2 bulan sekali umi mencari donatur untuk buat makanan sehat yang isinya makanan yang bergizi untuk anak-anak, biasanya itu dari teman-teman umi. Kita juga kadang ada kegiatan dari mahasiswa yang suka bagi-bagi makanan ke anak-anak biasanya isi nya itu susu sama snack-snack gitu kak. Kalau ada donatur juga pasti kita bagi-bagiin sembako buat orang tua karena mayoritas kan mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu jadi mereka berhak dapat sembako. Kita bagiin nya juga ga menyesuaikan jumlah anak sekolah disini karena ada beberapa anak yang satu anggota keluarga jadi kalau dalam 1 keluarga ada anak yang sekolah disini 2 atau 3 anak itu mereka dapat bagian paling banyak. Jadi kita bilangin ke orang tua kalau hak nya itu cuma buat 2 anak karena kalau 3 menyesuaikan jumlah anak nanti akan timbul rasa iri dengan orang tua yang lainnya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

Pernyataan ini serupa dengan yang dikatakan oleh Informan 3 selaku Wali Kelas Tas B Yayasan Bina Anak Pertiwi bahwa:

*“Kalau dulu itu kita sering bagi sembako buat orang tuanya kak jadi ada donatur yang bagi-bagiin tapi sekarang udah jarang banget. Kadang juga ada mahasiswa yang ngadain acara disini mereka ngasih snack sama susu gitu supaya anak-*

*anak itu senang kak.*” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023)

#### **4.2.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Advokasi Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi**

##### **a. Faktor Pendukung**

Dalam melakukan pelayanan dalam proses advokasi sosial di Yayasan Bina Anak Pertiwi terdapat beberapa faktor pendukung yang dialami oleh pengurus adalah pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan baik sehingga mempermudah proses pertolongan dalam memperjuangkan hak anak termasuk pada kerja sama pada sesama pengurus yang mampu saling membantu dengan baik sehingga proses pertolongan yang diberikan akan mudah berjalan. Selain itu juga faktor pendukung nya adalah orang tua, jika orang tua semangat dan mampu bekerja sama dengan baik dalam membantu pengurus maka proses pertolongan yang diberikan dapat berjalan dengan baik karena orang tua merupakan orang yang mampu memberikan arahan kepada anak ketika dirumah sehingga anak mengikuti arahan yang diberikan oleh orang tua.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Informan 4 dan 1 bahwa:

*“Kalo faktor pendukung itu dari pihak-pihak terkait ya kak karena dapat bekerja sama dengan baik dalam membantu pelayanan ini dapat berjalan karena kalau kita berjalan sendiri akan susah dan tidak akan bisa.”* (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 dengan Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)

*“Orang tua dapat bekerja sama dengan yayasan jadi kita lebih mudah ya dalam membantu nya dan pihak-pihak terkait yang*



*membantu kita dengan mudah memperjuangkan hak anak itu tadi.*” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

Sedangkan menurut Informan 2, yang menjadi faktor pendukungnya selain orang tua adalah pengurus yaitu tim kerja yang saling mendukung dan membantu.

Berikut yang disampaikan oleh Informan 2 dan 3 bahwa:

*“Orang tua, anak dan tim kerja ya kak karena jika mereka tidak saling mendukung dan tidak adanya semangat dalam bersama-sama membantu mewujudkan hak-hak anak ini maka tidak akan berjalan dengan baik kalau malas-malasan dan tidak saling mendukung.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi)

*“Faktor pendukungnya sih guru-guru disini kak, mereka semangat untuk ngebantu anak-anak belajar ya kak jadi anak-anak merasa terbantu dalam proses pembelajarannya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Wali Kelas Tas B)

#### **b. Faktor Penghambat**

Dalam melakukan advokasi sosial untuk memenuhi hak-hak anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi terdapat beberapa hambatan salah satunya adalah orang tua dan anak, karena mereka bekerja di jalanan hingga larut malam maka anak-anak kekurangan waktu untuk tidur sehingga ketika waktunya bersekolah merasa ngantuk dan akhirnya tidak masuk sekolah. Selain itu juga orang tua yang malas-malasan dalam membantu proses advokasi sehingga hal ini menjadi terhambat dalam memberikan pertolongan. Hambatan

lainnya yang dirasakan oleh pengurus yayasan adalah dana karena Yayasan Bina Anak Pertiwi sudah tidak memiliki donatur sehingga pengurus mencari donatur secara mandiri. Selain itu juga di Yayasan Bina Anak Pertiwi mengalami kekurangan sumber daya manusia, hal ini dikarenakan masing-masing pengurus memiliki kesibukan yang harus dijalani seperti bekerja dan kuliah maka dalam proses pelayanan terkadang terhambat karena sulit mencari pengganti pengurus yang mampu membantu.

Berikut disampaikan oleh Informan 1 dan 3 bahwa:

*“Karena orang tua anak itu sendiri yang malas, ketika kita arahkan itu ga mau gerak sehingga kita terhambat untuk membantu dalam proses tersebut jadi orang tua dan yayasan tidak sinkron.”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Ketua Yayasan Bina Anak Pertiwi)

*“Kalau untuk pendidikan itu sih faktor penghambatnya orang tua sih kak karena kadang anaknya rajin tapi orang tua nya ga mendukung anaknya buat berangkat kesini karena kan mereka bekerja di jalanan ya kak...”* (Hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Wali Kelas Tas B)

Pernyataan bahwa faktor penghambatnya selain dana yaitu kurangnya sumber daya manusia di Yayasan Bina Anak Pertiwi sehingga hal ini menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada anak binaan.

Hal disampaikan oleh Informan 2 selaku Kepala Sekolah Yayasan Bina Anak Pertiwi:

*“Yang terutama itu dana karena kita sudah tidak ada lagi donatur tetap yang memberikan bantuan kepada yayasan jadi kita mencari-cari sendiri donatur-donatur tersebut. Lalu yang kedua itu SDM, seiring berjalannya waktu karena masing-*

*masing memiliki kesibukan dan memiliki tanggung jawab untuk orang tua nya mereka bekerja ya kak sehingga di yayasan itu semakin kekurangan SDM dan hanya tersisa beberapa jadi terkadang beberapa orang tersebut jika berhalangan maka sulit untuk mengganti penggantinya.”*  
(Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023)

Sedangkan, menurut Informan 4 selaku Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi selain dana yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah anak-anak, karena mereka terbiasa mencari uang sehingga lupa bahwa pendidikan itu adalah hal penting bagi anak.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Informan 4:

*“Faktor hambatannya itu anak-anak itu sendiri karena mereka sudah terbiasa mencari uang, kalau mereka diajak untuk belajar kadang mereka merasa keberatan.... Selain itu, faktor penghambatnya dana kak karena kita bukan lembaga yang dibawah naungan pemerintah jadi kita mencari donatur sendiri.”* (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2023 dengan Staff Umum Yayasan Bina Anak Pertiwi)